

KONFLIK PERBURUHAN DAN PROSES PENYELESAIANNYA : PERSPEKTIF HAM

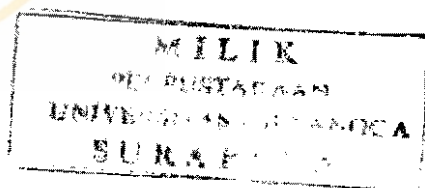
SKRIPSI

RF
Fis. P 179/1998
7111
K



Oleh :

EKA SRI YULIANTI
NIM. 079314145



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP TAHUN 1997/1998

**KONFLIK PERBURUHAN DAN PROSES PENYELESAIANNYA :
PERSPEKTIF HAM**

SKRIPSI

**Maksud : sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga**



Oleh :

EKA SRI YULIANTI

NIM. 079314145

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP TAHUN 1997/1998**

Skripsi ini di setujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

Pada Hari : Senin

Tanggal : 29 Juni 1998

Jam : 09.00 WIB



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 29 Juli 1998

Jam : 09.00 WIB

Tim Penguji



Ketua

Drs. Kacung Marijan, MA

Nip. 131 836 623

Anggota

Drs. Aribowo, Msi

Nip. 131 453 806

Anggota

Drs. Kris Nugroho, MA

Nip. 131 801 408

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

ABSTRAK

**Eka Sri Yulianti
079314145**

**Judul : Konflik Perburuhan dan Proses Penyelesaiannya :
Perspektif HAM**

(V bab)

41 tabel
Bibliografi (tahun 1949 – tahun 1998)

Skripsi ini merupakan gambaran mengenai proses penyelesaian konflik perburuhan yang dilakukan oleh buruh-majikan. Disamping adanya keterlibatan pihak-pihak lain mulai dari Depnaker selaku perantara dalam pola penyelesaian bipartite hingga aparat keamanan yang seharusnya tidak berhak ikut terlibat. Ini berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1957. Diharapkan skripsi ini merupakan bagian dari proses yang membawa harapan baru bagi kehidupan buruh di Indonesia.

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bab pertama sebagaimana umumnya sebuahnya buku merupakan pendahuluan yang isinya mengutarakan alasan rasional, termasuk latar belakang maupun beberapa pertanyaan yang ingin dijawab. Selain itu juga dijelaskan metodologi yang digunakan melalui studi pustaka dan alasan mengapa dipilih model penelitian ini.

Bab dua mengupas sekitar masalah industri dan HAM di Jawa Timur selama Orde Baru, mulai dari proses transformasi dari agraris ke industri hingga pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja.

Dalam bab tiga disajikan permasalahan tenaga kerja di Jawa Timur sepanjang tahun 1993 – 1997, yang meliputi sejumlah faktor yang dapat memicu terjadinya konflik perburuhan sekaligus jumlah pemogokan dan jumlah buruh yang terlibat dalam pemogokan tersebut. Juga akan dijelaskan keterlibatan pihak-pihak diluar UU Nomor 22 tahun 1957. Di samping sketsa HAM dalam politik perburuhan di Jawa Timur sendiri.

Bab empat membahas tentang faktor dominan yang dapat memicu terjadinya konflik, yaitu UMR yang mengakibatkan dilanggarnya hak asasi seorang buruh. Selain disfungsi SPSI selaku organisasi tunggal pekerja pada masa Orde Baru serta bagaimana mekanisme penyelesaian konflik perburuhan itu sendiri.

Bab terakhir merupakan kesimpulan dan refleksi di mana dalam bagian ini dimasukkan penilaian dan refleksi pribadi atas studi ini. Dalam hal ini, yang jadi perhatian adalah lebih dominan keterlibatan aparat keamanan dalam setiap proses penyelesaian konflik perburuhan, sehingga SPSI tidak dapat berperan sebagaimana mestinya dalam memperjuangkan hak asasi yang dimiliki buruh. Demikian juga halnya dengan Depnaker. Dan terakhir sekali peneliti meletakkan refleksi pribadi terhadap keseluruhan gagasan dan proses studi ini.